

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pemerintah harus memahami keterikatannya dengan masyarakat lebih khusus pemerintah Desa karena Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam suatu Riwayat Rasulullah Saw bersabda:

“Imam itu adalah laksana pengembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang di Gembalakan nya)” (HR. Imam Al- Bukhari dan Imam Ahmad dari Sahabat Abdullah bin Umar r.a)

Jadi pemerintah daerah harus memfokuskan kinerja disetiap Desa dalam rangka pengembangan masyarakat agar bersinergi baik pemerintah Daerah, Desa dan masyarakat. Sehingga Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- h. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- i. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- j. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- k. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- l. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- m. Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Menurut undang-undang terbaru tentang Dana Desa (DD) Tahun 2018 yaitu:

Arah kebijakan DD Tahun 2018 adalah ;

5. Menyempurnakan formula pengalokasian DD
6. Fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan DD
8. Mempertajam prioritas penggunaan DD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari peraturan ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi terutama terhadap daerah yang tertinggal dan meningkatkan akuntabilitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk kegiatan sosial dari Desa.

Dari Anggrana Desa masyarakat memiliki harapan besar untuk menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan bagi Masyarakat setempat dengan birokrasi yang sudah direncanakan dan harus direalisasikan sesuai dengan fungsinya yaitu Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Dan Undang-Undang Bupati Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Pasal I Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan penetapan rincian Dana Desa Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 Yaitu Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi belanja desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Desa memiliki fungsi yang sangat besar terutama menjalankan alokasi dana desa sesuai dengan perundang-undangan seperti menyiapkan

Laporan anggaran dari setiap Bidang-Bidang yang sudah ditentukan melalui Desa yaitu :

Jumlah biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

- e. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 895.985.160,42.
- f. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa senilai Rp. 1.430.127.632,00
- g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 147.408.550,00
- h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 297.358.866,77

Berjalannya birokrasi desa tidak lepas dari masyarakat yang bergerak, optimis dan mau bekerjasama dengan penyediaan transparansi yang dibuka oleh kepala Desa yaitu Bapak Lalu Minaksa selaku Kepala Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

5.2 Saran

Setiap pemerintah yang bertugas pasti memiliki peran dan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera kepada masyarakatnya maka formulasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila Visi Misinya direalisasikan berdasarkan Undang-Undang Yang telah ditetapkan termasuk DiDesa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa, Sehingga masyarakat dapat dengan muda dalam mendapat informasi dalam kepengeurusan surat menyurat dalam desa. Adapun yang menjadi saran dari penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) harus lebih efektif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa yang sedang berlangsung dengan melaksanakan tugas dan bertanggung jawabnya sebagai wakil/warga desa dengan sebaik-baiknya seperti apa yang menjadi tugas dari BPD di Desa Rembitan agar birokrasi desa dapat dijalankan dengan tepat dan mampu menatah desa menjadi lebih baik.
2. Kepala Desa harus lebih meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin Desa Rembitan agar Desa Rembitan dapat menjadi desa yang diteladani dan menjadi Desa tempat masyarakat yang sejahtera serta kepala desa harus dapat mengayomi masyarakat desa menjadi masyarakat yang Demokratis. Dan tugas seorang pemimpin adalah sebagai penggerak untuk menopang seluruh masyarakat untuk bekerja dan ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan alokasi dana desa.
3. Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah hendaknya ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat Rembitan dengan menciptakan masyarakat yang taat akan hukum., toleransi, adil, serta mampu memberikan partisipasi dalam pemberian saran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum di desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, Karya Tulis Ilmiah

- Abdul Wahab, Solichin. 2012 *Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Pelayanan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta :PT, Bumi Aksara.
- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi dan Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aisyah, Siti. 2018. *Analisis Proses Penggunaan Dana Desa*. Skripsi. Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Anderson, J.E. 1975. *Publik Policy Making*. London: Nelson.
- Bambang Trisanto. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *“Memahami Penelitian Kualitatif”*. Jakarta RinekaCipta.
- Beratha, I. N. 1992. *Desa, Masyarakat Desa Dan Pembangunan*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Brannen, Julia, 2005, “Menggabungkan Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kualitatif: Sebuah Tinjauan” (diterjemahkan oleh H. Nuktah Arfawie Kurde, DKK.), dalam Julia Brannen’, eds. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djaenuri, M. A. (2015). *Kepemimpinan, Etika dan Kebijakan Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Instruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa.
- Miftahuddin. 2018. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
- Moleong, J.L. (2004) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya

Mulyani Indrawati, Sri. 2018 “*Buku Pintar Dana Desa*” Jakarta Pusat: Gd. Radius Prawiro.

Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit afabeta

Suharto, Edi. (2008), *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Wahyudi, Rio. 2019. *Peran Pemerintah Desa Poto Tano Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pulau Kanawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*. Skripsi. Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Mataram.

B. Peraturan Perundang-Undang

Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara RI Nomor. 5495.

Pemerintah indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Nomor. 4437.

Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Keuangan*. Lembaran Negara RI Nomor. 4438.

Peraturan Bupati Lombok Tengah. 2019. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan Dan Penetapan Rincian Dana Desa Dikabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019*. Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2019 Nomor.

Peraturan Bupati Lombok Tengah. 2018. *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2018 Nomor.

C. Website

www.Jdih.Kemenkeu.go.id/2017/20/peraturan-Menteri-Kuangan-No.112/PMK.07/2017/ diakses tanggal 30 oktober 2019.

www.keuangandes.com/2015/01/mengawal-dana-desa/ diakses tanggal 30 oktober 2019.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : ISRA WATI
NIM : 216110119
KONSENTRASI : Kebijakan Publik
NAMA PEMBIMBING I : Drs. H. Abdurrahman, MM

NO.	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	MASUK	KELUAR		
1			- Pubs Kerryh Berpikir (Edward B) + Relaniska DV.	
2			- Tembelon Baliti wawanc.	
3			- Ceting Indikator harus k duby red data appras yang ada.	
4				
5				

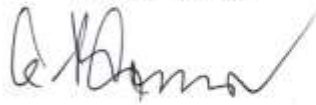
Handwritten notes and signatures:
 25/1-2020
 1/2-2020
 Matarani, 01/02/2020

Mengetahui
 Prodi Adm Publik
 Ketua



(Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP)
 NIDN. 0822048901



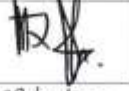
Dosen Pembimbing I



Drs. H. Abdurrahman, MM
 NIDN.0804116101

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : ISRA WATI
NIM : 216110119
KONSENTRASI : Kebijakan Publik
NAMA PEMBIMBING II : M. Taufik Rachman, SH.MH

NO.	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	MASUK	KELUAR		
1	14/1/2020	15/1/2020	Pembahasan + data Kesimpulan/pembah	
2	21/1/2020	21/1/2020	Pembahasan, penulisan data	
3	23/1/2020	23/1/2020	Skripsi lengkap	
4	27/1/2020	27/1/2020	Penulisan Abstrak	
5	27/1/2020	27/1/2020	ACC	

Mataram, 27/01/2020

Mengetahui
 Prodi Adm Publik
 Ketua



(Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP)
 NIDN. 0822048901

Dosen Pembimbing II



M. Taufik Rachman, SH.MH
 NIDN. 0825078701



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
STATUS TERAKREDITASI "B"
Jalan K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram
E-mail : fislpolummat@gmail.com

BERITA - ACARA

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Lima** Bulan **Pebruari** Tahun **Dua Ribu Duapuluh** telah diselenggarakan **Ujian Skripsi** bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dan dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS** dengan predikat **EUKUP / MEMUASKAN / SANGAT MEMUASKAN/ CUM LAUDE**, Mahasiswa :

Nama : **ISRA WATI**
Nomor Mahasiswa : **216110119**
Konsentrasi : **Administrasi Pembangunan**
Program Studi : **Administrasi Publik**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN MENCEGAH KESENJANGAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA REMBITAN KEC. PUJUT KAB. LOMBOK TENGAH)"**

Rekap Nilai dari masing-masing Dosen Penguji sebagai berikut :

No	Nama Dosen Penguji	Jabatan	Indeks Prestasi
1	Drs.H.Abdurrahman,MM NIDN . 0804116101	Penguji Ketua	3.82
2	M.Taufik Rachman, SH., MH NIDN. 0825078701	Penguji Anggota 1,	3.66
3	Drs. H. Darmansyah, M.Si NIDN. 00075914	Penguji Anggota 2,	3.62
TOTAL			

Jumlah Ip $\frac{11,1}{3} = 3.7$
IPK :
Jmlh Penguji

Mataram, 5 Pebruari 2020

TEAM PENGUJI SKRIPSI

Penguji Ketua,

Drs. H. Abdurrahman, MM
NIDN: 0804116101

Penguji Anggota 1,

M. Taufik Rachman, SH, MH
NIDN: 0825078701

Penguji Anggota 2,

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 00075914

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **ISRA WATI**
 Nomor Mahasiswa : 216110119
 Jurusan : Urusan Publik
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	3.75	7.50	
2	Latar Belakang / Alasan	2	3.75	7.50	
3	Wawasan Pengetahuan	2	4.	8	
4	Methodologi	3	3.75	11.25	
5	Penyajian Data	3	3.75	11.25	
6	Analisa Data	4	3.75	15.0	
7	Kesimpulan	2	3.75	7.50	
8	Konsistensi Bahasa	3	3.75	11.25	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
JUMLAH		25			

TOTAL BN 3.82
 IPK : =
 TOTAL B

Mataram, 5 Pebruari 2020
 Penguji Utama,



Drs. H. Abdurrahman, MM
 NIDN: 0804116101

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **ISRA WATI**
 Nomor Mahasiswa : 216110119
 Jurusan : Urusan Publik
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	3,5	7	
2	Latar Belakang / Alasan	2	3,5	7	
3	Wawasan Pengetahuan	2	5,8	7,6	
4	Methodologi	3	3,5	10,5	
5	Penyajian Data	3	3,5	10,5	
6	Analisa Data	4	3,5	14	
7	Kesimpulan	2	3,5	7	
8	Konsistensi Bahasa	3	4	12	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
JUMLAH		25		91,6	

TOTAL BN ^{91,6} = 366
 IPK : $\frac{91,6}{25} = 3,66$
 TOTAL B

Mataram, 5 Pebruari 2020
 Penguji Anggota 1,



M. Taufik Rachman, SH, MH
 NIDN: 0825078701

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **ISRA WATI**
 Nomor Mahasiswa : **216110119**
 Jurusan : **Urusan Publik**
 Program Studi : **Administrasi Publik**
 Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
 Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	3.5	7	
2	Latar Belakang / Alasan	2	3.5	7	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3.5	7	
4	Methodologi	3	3.5	10.5	
5	Penyajian Data	3	3	9	
6	Analisa Data	4	3.5	14	
7	Kesimpulan	2	4	8	
8	Konsistensi Bahasa	3	4	12	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
JUMLAH		25			

TOTAL BN
 IPK :
 TOTAL B

3,62

Mataram, 5 Pebruari 2020
 Penguji Anggota II,



Drs. H. Darmansyah, M.Si
 NIDN: 00075914



Agro : 189/17/12/19
Tgl : 17/12/19
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI "B"
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723



Nomor : 84/II.3.AU/F/XI/2019
Lamp : Proposal Skripsi
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Mataram, 03 Rabiul Akhir 1441 H
04 Desember 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Rambitan Kec. Pujut Kab. Lombok Barat**

di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan syarat-syarat untuk mencapai kebulatan studi program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, maka para mahasiswa harus memenuhi Karya Ilmiah (Skripsi), untuk keperluan tersebut kami mohonkan izin bagi mahasiswa berikut:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ISRA WATI |
| 2. NIM | : 216110119 |
| 3. Jurusan | : Urusan Publik |
| 4. Program Studi | : Administrasi Publik |
| 5. Tujuan | : Untuk Memperoleh Data |
| 6. Tema / Judul | : "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Mencegah Kesenjangan Sosial (Studi Kasus Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)" |
| 7. Lokasi Penelitian | : Desa Rambitan |

Demikian atas bantuan dan rekomendasi/izin bagi mahasiswa yang bersangkutan, kami khaturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. BPD (Badan Permusyawarahan Desa)
1. Rektor UMMAT (untuk maklum);
2. Saudara mahasiswa yang bersangkutan (untuk maklum)
3. Arsip

LAMPIRAN II. TRANSKIP WAWANCARA

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.

1. Bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa apakah ada faktor penghambat dan pendukung
2. Berapa Dana ADD Yang Turun Dari Pemerintah Pusat dan Di Alokasikan untuk Apa saja Dana Tersebut? Tolong diberi penjelasanya
3. Bagaimana Proses Pengelolaan Alokai Dana Desa?
4. Bagaimana Perencanaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa?
5. Apakah ada Kendala dari Pelaksanaan Pembangunan terkait Alokasi Dana Desa, serta Manfaatnya apa saja?
6. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban mengenai Pelaksanaan Pembangunan terkait Alokasi Dana Desa?
7. Bagaimana respon masyarakat terkait dengan kebijakan desa terutama alokasi Dana Desa terhadap pembangunan disini adakah pendekatan secara intensif terhadap kosolidasi publik

B. Wawancara dengan Masyarakat Desa Rembitan

1. Bagaimana Transparansi Dana mengenai dana ADD?
2. Untuk partisipasi masyarakatnya Gimana Pak?
3. Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan masyarakat?
4. Apakah masyarakat selama ini ada pengaruh atau perubahan yang mendasar dari terealisasinnya Alokasi dana desa ini pak?

LAMPIRAN 11I GAMBAR HASIL WAWANCARA

Gambar. 1 wawancara dengan kepala Desa Rembitan



Gambar II Wawancara Dengan Staf Desa Rembitan



Gambar III Wawancara Dengan BPD Desa Rembitan



Gambar IV. Wawancara Dengan Masyarakat Desa Rembitan

